

## **Pendidikan Politik Pada Pondok Pesantren Abu Manshur Kabupaten Cirebon**

**<sup>1</sup>Nurul Azizatul Isnaini, <sup>2\*</sup>Rasmuin**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>1</sup>[nurulazizatul16@gmail.com](mailto:nurulazizatul16@gmail.com), <sup>2\*</sup>[muin@uin-malang.ac.id](mailto:muin@uin-malang.ac.id)

**Abstrak:** Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan keagamaan sosial dan politik. Pondok pesantren merupakan replika kehidupan yang memadukan pelbagai kecakapan hidup, tak terkecuali kecakapan politik. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi Pondok Pesantren Abu Manshur untuk memberikan pendidikan politik kepada para santrinya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menanamkan pendidikan politik kepada para santrinya, Pondok Pesantren Abu Manshur melakukannya melalui dua jalan yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis dilakukan dengan memasukkan pendidikan politik kedalam berbagai kegiatan rutin pondok pesantren. Sedangkan secara praktis pendidikan politik pada santri dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan secara intensif serta melalui kegiatan praktik lapangan ke lembaga lain.

**Kata kunci:** Pendidikan, Politik, Pesantren

**Abstract:** *Islamic boarding schools are the oldest Islamic educational institutions in Indonesia that have contributed greatly to the development of social and political religions. Pesantren is a replica of life that combines various life skills, including political skills. This research was conducted using qualitative methods. Data obtained through observation, interviews and documentation. The results showed that in imparting political education to its students, the Abu Manshur Islamic Boarding School did so in two ways, namely theoretically and practically. Theoretically, this is done by incorporating political education into various routine activities of Islamic boarding schools. Meanwhile, practically, political education for santri is carried out through intensive leadership training and through field practice activities to other institutions.*

**Keywords:** *Education, Politics, Islamic Boarding School*

### **PENDAHULUAN**

Kehidupan manusia, semua aspek yang menyangkut hajat hidup manusia ada keterkaitannya dengan keputusan politik. Indonesia merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari kontestasi politik dunia. Semua otoritas publik, ditentukan pada ruang politik. Era globalisasi menghasilkan banyak pengaruh karena politik internasional yang dapat dirasakan bangsa Indonesia. Terhadap IPTEK, perilaku bangsa, dan bahkan sistem nilai yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan UU nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Pasal 1 Ayat (1), Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh

perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>.

Pesantren merupakan replika kehidupan yang memadu pelbagai kecakapan hidup, tak terkecuali kecapan politik. Dalam sudut pandang politik, unsur pendidikan yang berperan penting adalah pendidikan politik yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi terciptanya budaya politik bernafaskan Pancasila. Kontestasi politik menjadi agenda kepentingan setiap golongan sehingga menimbulkan faksi-faksi politik yang justru tidak sesuai dengan cita-cita negara. Bahkan tak jarang pondok pesantren dijadikan komoditas politik bagi orang-orang yang memiliki kepentingan.

Menjelang pemilihan umum, pemilihan bupati dan lain sebagainya, para kandidat gencar sekali melakukan sosialisasi ke berbagai pondok pesantren. Seperti biasa, pesantren adalah salah satu sasaran empuk lumbung suara. Pondok pesantren, terutama figur kiai adalah elemen strategi upaya mendulang suara. Selain memiliki banyak jamaah, kiai juga merupakan figur spiritual yang lisannya masih didengarkan oleh masyarakat. Islam sendiri adalah agama paripurna yang memiliki konsepsi politik yang tentunya juga paripurna. Disinilah ulama harus berhati-hati melangkah. Kesalahan langkah ulama dalam berbaur dengan politik praktis akan berdampak besar bagi bangsa ini. Idealnya, keterlibatan ulama dalam politik akan membawa bangsa ini pada puncak kebaikan dan kemuliaan. Satu hal yang penting adalah jangan sampai terjadi proses polarisasi yang makin menajam dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada perspektif sudut pandang politik, sistem nilai yang menjadi acuan bagi dinamika politik Indonesia diyakini mengalami kemunduran dan bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi kunci utama bagi kehidupan bangsa Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi penyimpangan tersebut. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

---

<sup>1</sup> UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (2019).

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara <sup>2</sup>.

Sadar akan politik membuka ruang pemikiran menjadi lebih banyak. Dengan peran pemuda yang pro aktif dalam kegiatan yang terjadi di Pondok Pesantren Abu Manshur menjadi landasan awal upaya pembentukan budaya politik, tentunya tidak menjadikan para santri obyek politik praksis. Untuk itu, penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan pendidikan politik yang secara formal dan informal dalam pendidikan Islam di pesantren.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Pendidikan Politik

Warga negara adalah salah satu entitas utama dalam sebuah negara. Negara memiliki tujuan yang tercantum pada alinea 4 pembukaan UUD 1945. Usaha dalam mencapai tujuan tentunya dibutuhkan kesadaran dari para warganya. Warga negara dituntut berperan aktif dalam segala lini kehidupan kenegaraan. Pemahaman politik adalah fundamental yang harus dibangun secara *grassroot*. Diperlukan suatu upaya pencerdasan dan edukasi mengenai pendidikan politik bagi warga negara. Pendidikan politik ini merupakan usaha untuk membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya <sup>3</sup>. Kartono juga memberikan pandangan bahwa pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik <sup>4</sup>.

Demi mencapai civil society Indonesia, secara umum pendidikan politik bertujuan seperti tercantum dalam Inpres RI No. 12 tahun 1982 yaitu: Menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia seutuhnya, yang perwujudannya akan tercermin dalam sejumlah ciri watak dan kepribadiannya sebagai berikut <sup>5</sup>:

1. Sadar akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap kepentingan bangsa dan negara yang terutama diwujudkan melalui keteladanan.
2. Secara sadar taat pada hukum dan Undang Undang Dasar.

---

<sup>2</sup> UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

<sup>3</sup> Robert Brownhill dan Patricia Smart, *Political Education* (New York: Routledge, 1989).

<sup>4</sup> Kartono Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

<sup>5</sup> Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (1982).

3. Memiliki disiplin pribadi, sosial, dan nasional.
4. Berpandangan jauh ke depan serta memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih maju, yang didasarkan pada kemampuan objektif bangsa.
5. Secara sadar mendukung sistem kehidupan nasional secara demokratis.
6. Aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam usaha.
7. Aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa.
8. Sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam secara selaras, serasi, dan seimbang.
9. Mampu melaksanakan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari luar Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Instruksi Presiden ini mengimplikasi penyelenggaraan pendidikan politik di pondok pesantren harus mampu membentuk santri yang siap untuk berpartisipasi aktif berdasar pada Pancasila yang tidak menyimpang dari ajaran Islam. Pendidikan politik ini seperti diungkap Batawi (2013, hlm. 30) yang mengatakan bahwa pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila <sup>6</sup>. Pandangan ini ditegaskan oleh aturan hukum negara yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 36/2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik pasal 3 poin c berbunyi berkembangnya karakter bangsa yang selaras budaya dan sejarah bangsa.

## **B. Hubungan Islam dan Politik**

Agama merupakan suatu asas dan panduan hidup bagi para pemeluknya. Meski dalam konteks kemasyarakatan penghayatan atas agama tentu berbeda secara gradual, agama sendiri tetap merupakan pusat pemikiran manusia dalam upaya membentuk suatu kosmos keramat yang senantiasa berkaitan dengan transformasi masyarakat manusia dari zaman ke zaman <sup>7</sup>. Islam sebagai agama merupakan ajaran fondasional yang menjadi mendasari

---

<sup>6</sup> Johasan Watson Batawi, 'Tingkat Kesadaran Politik Pemula Dalam Pilkada', *Jurnal UNIERA* 2, no. 2 (2013).

<sup>7</sup> Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama SEbagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991).

berbagai bidang kehidupan para pemeluknya. Dasar pokok bagi ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam hubungannya dengan politik, Al-Qur'an sebagai landasan utama yang mendasari ajaran Islam, lebih memberi perhatian tentang keadilan dan moralitas yang ditegakkan di tengah masyarakat daripada struktur formal politik yang harus ditegakkan umat Islam<sup>8</sup>. Hal ini didasari oleh fakta bahwa Al-Qur'an maupun Al-Hadits tidak memberikan penjelasan yang utuh mengenai bentuk pemerintahan dan lembaga-lembaga politik formal yang menjadi tuntutan untuk ditegakkan oleh umat manusia. Dalam hal ini politik menjadi bidang yang bersifat dinamis dan fleksibel di dalam ajaran Islam sehingga dapat seturut dengan perkembangan peradaban manusia<sup>9</sup>.

Meninjau dimensi historisitasnya, politik di dalam Islam terus mengalami perkembangan bahkan sejak zaman peralihan pemerintahan dari Nabi saw. ke Khulafaur Rasyidin. Dalam jurnal *Fundamentalisme dan Masa Depan Ideologi Politik Islam*, hubungan antara Islam, dan politik biasanya merujuk pada peristiwa di *Thāqifah Banī Sa'īdah*, dimana pada peristiwa itu ditetapkan kriteria pengangkatan *Khulafā al-Rāsidīn*. Inilah dasar yang dijadikan tonggak ulama fiqih Sunni menjelaskan hubungan agama, dan negara. Para kritikus Islam berpendapat bahwa pertemuan yang dihelat di *Thāqifah Banī Sa'īdah* dinilai tidak direncanakan dengan matang, tergesa-gesa, dan tidak memiliki dasar teologis yang kuat. Apalagi tidak semua unsur sahabat penting hadir dalam musyawarah tersebut. Setelah berbagai peristiwa yang mendahuluinya, barulah pembahasan mengenai politik Islam dibahas secara komprehensif dan sistematis sebagai suatu diskursus yang terus berkembang dengan prakarsa sejumlah tokoh seperti Ibn Rabi' (833-842 M), al-Baqillani (w. 1013 M), dan al-Mawardi (974-1058 M)<sup>10</sup>.

Sejak awal mula perkembangannya, Islam telah mewujudkan pranata dan acuan perekat yang bersifat transendental dalam menata bangunan sosial kemasyarakatan umat Islam<sup>11</sup>. Hal ini juga telah dikemukakan lebih dulu oleh Fazlur Rahman dalam tulisannya yang berjudul *The Qur'anic Concept of God*,

---

<sup>8</sup> Muhammad Baqir Shadr, *Risalatuna Pesan Kebangkitan Umat: Konsep Dakwah, Pemikiran, dan Reformasi Sosial* (Yogyakarta: Rauzyan Fikr, 2011).

<sup>9</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Bandung: Penerbit Mizan, 2017).

<sup>10</sup> Efrinaldi, 'Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan', *Jurnal Al Ijarah* 2, no. 2 (2017); Syafruddin Syam, 'Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia', *Jurnal Al-Hadi* 2, no. 2 (2017).

<sup>11</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: Pustaka Uama Grafiti, 1990).

the Universe and Man<sup>12</sup>. Namun dari sudut pandang individu yang berpolitik, praksis politik dan religiusitas sering kali menjadi dua hal yang berlainan dan tidak memengaruhi satu sama lain. Imaji politik sebagai “yang kotor” dan rendah yang tersematkan kepada politisi Islamis tidak lain disebabkan oleh tidak sejalannya jargonisme politik identitas dengan praksis politik yang malah mengutamakan kepentingan kaum pengeruk modal semata alih-alih kepentingan dan kemaslahatan umat<sup>13</sup>. Sehingga berdasarkan pengalaman pasang surut perpolitikan di berbagai negara dengan mayoritas umat Muslim, rekonstruksi politik Islam menjadi penting untuk menyelaraskan keluhuran praksis rukun Islam dengan praksis politik yang bersifat profan<sup>14</sup>.

Islam dan politik memiliki hubungan yang erat jika keduanya dipahami sebagai sarana untuk mengatur kebutuhan seluruh kehidupan manusia. Islam tidak hanya digunakan sebagai kedok untuk mendapatkan kepercayaan dan pengaruh sosial. Politik tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan. Politik, yang dipahami hanya sebagai perebutan kekuasaan atau pemerintahan, hanya akan mengaburkan makna luasnya dan menutup sumbangsih Islam terhadap politik secara umum. Orang sering lupa bahwa Islam bisa menjadi sumber inspirasi budaya dan politik. Pemahaman yang luas tentang terminologi politik, akan memperjelas relevansinya dengan Islam

Mengutip dari Azyumardi Azra dalam tulisannya *Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia*, Potret kelekatan Islam, dan politik di Indonesia secara eksplisit ditunjukkan dengan adanya istilah Islam politik dan Islam kultural pada dekade 80-an. Islam politik yang dimaksud adalah Islam yang memiliki orientasi kuat kepada politik dan kekuasaan, sedangkan Islam kultural adalah Islam yang memiliki orientasi kepada pengembangan aspek sosio-kultural dari jalur non politik seperti dakwah secara damai, pendidikan, dan ekonomi<sup>15</sup>. Sebagai contoh nyata, para elit organisasi keagamaan, sebut saja Muhammadiyah dan NU acapkali mempraktikkan peranan Islam politik dan Islam kultural secara bergantian. Mereka diantaranya KH. Wahab Chasbullah (1883-1971 M), KH. Wahid Hasyim (1914-1953 M), M. Natsir (1908-1993 M), KH. Abdurrahman Wahid (1940-2009M), dan Amin Rais (1944- M). Bahkan, KH. Wahab Chasbullah pun pernah melontarkan pendapat

---

<sup>12</sup> Fazlur Rahman, ‘The Qur’anic Concept of God, the Universe and Man’, *Islamic Studies* 6, no. 1 (1965).

<sup>13</sup> Deepa Kumar, *Islam Politik: Sebuah Analisis Marxis* (Yogyakarta: Indo Progress, 2016).

<sup>14</sup> Ibnu Burdah, *Islam Kontemporer, Revolusi, dan Demokrasi: Sejarah Revolusi Politik Dunia Islam dan Gerakan Arab dalam Arus Demokrasi Global* (Malang: Intrans Publishing, 2014).

<sup>15</sup> Azyumardi Azra, ‘Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia’, *Jurnal Indo-Islamika* 1, no. 2 (2012).

bahwa “Islam, dan politik ibarat gula, dan manisnya. Dengan demikian, Islam, dan politik di Indonesia, baik dilihat dalam tataran historis, sosiologis, maupun praksis merupakan dua kesatuan yang saling melekat, keduanya tak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya <sup>16</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara peneliti lakukan dengan pengasuh dan juga alumni pesantren untuk mendapatkan informasi bagaimana pesantren mendidik santrinya dalam dunia politis. Observasi dilakukan peneliti untuk melihat secara langsung kegiatan santri yang berhubungan dengan pendidikan politik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Pendidikan Politik pada Pesantren Abu Manshur**

Santri sebagai warga negara juga memiliki kewajiban menepati tujuan Indonesia. Dengan peran aktif dalam kehidupan kenegaraan. Pemupukan pemahaman politik sebagai wujud upaya membentuk santri siap menghadapi permasalahan jika dibenturkan dengan politik. Pendidikan politik wajib diberikan oleh institusi pondok pesantren, tujuannya agar membentuk karakter pada jati diri santri, sehingga dapat memerankan peran politiknya yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yaitu Pancasila. Kartono menyebutkan pemahaman politik berarti pemahaman konflik <sup>17</sup>. Pendidikan politik bagi santri merupakan jawaban terhadap pandangan buruk terhadap pesantren agar santri mampu mengelola konflik bukan menyebabkan konflik yang berdasar pada agama. Sehingga pendidikan politik ini mampu menjadi sarana pendidikan diri bagi para santri.

Jelas nyatanya bahwa pendidikan politik bukan sebatas menekankan pada aspek pemahaman politik warga negara, namun juga menjadi pendidikan diri bagaimana bersikap sebagai seorang warga negara. Maka nampak bahwa tujuan pendidikan politik adalah untuk menciptakan warga negara yang memiliki pemahaman dan kesanggupan untuk bertindak dalam kehidupan negara dengan dilandasi tanggung jawab sebagai warga negara. Hal inilah menjadi dasar diperlukannya pendidikan politik dalam dunia pesantren seperti yang dipahami oleh pondok pesantren Abu Manshur.

---

<sup>16</sup> Greg Barton dan Greg Fealy, *Tradisionaisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2012).

<sup>17</sup> Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*.

Pendidikan politik yang diselenggarakan pondok pesantren merupakan upaya membentuk santri yang memiliki pemahaman agama dan politik secara teoritis sekaligus praktis. Mengutip dari Brownhill dan Smart mereka berpendapat:

“we shall use Stradling’s proposals for such a curriculum as a checklist for deciding on priorities. He examines the contents of the political curriculum by dividing into three sections: knowledge, skills, and attitudes and procedural values. He further divides knowledge into propositional knowledge, and practical knowledge and understanding: skills into intellectual skills, action skills, and communication skills”<sup>18</sup>.

Berdasarkan pendapat tersebut, kurikulum yang seharusnya ada dalam pendidikan politik meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai prosedural. Ketiga bagian tersebut harus ada dalam pelaksanaan pendidikan politik. Pengetahuan atau aspek kognitif sangat diperlukan sebagai landasan pemahaman untuk bertindak politik secara nyata. Pengetahuan ini lebih bersifat teoritis, sedangkan keterampilan lebih bersifat aplikatif yaitu penerapan dari pengetahuan politiknya dalam kehidupan. Perlu adanya suatu nilai prosedural yang dipegang untuk dijadikan acuan dan batasan dalam melaksanakan tindakan politiknya.

Pada ketiga bagian tersebut, terlihat bahwa dalam pendidikan politik bukan hanya ditekankan dalam hal pemahaman politik warga negara yang bersifat teoritis saja, namun juga perlu adanya suatu aksi atau tindakan politik yang nyata dari warga negara setelah memiliki pemahaman politik tersebut. Hal ini didasari bahwa pendidikan politik bukan hanya menjadikan manusia yang pintar politik secara intelektualisnya saja, namun seperti diungkapkan Kartono <sup>19</sup> bahwa pendidikan lebih menekankan pada kemampuan mawas situasinya secara kritis, menentukan sikap yang benar, melatih ketangkasan aksi/berbuat.

Pondok Pesantren Abu Manshur dalam segi formal mengakomodir pendidikan politik dan nilai-nilainya diterapkan dalam kehidupan berorganisasi. Terbukti dengan hidupnya demokrasi dalam lingkup OSIS. Secara formal, dalam kurikulum memang tidak menggambarkan pendidikan politik dengan alokasi waktu tertentu, namun ketika ceramah, kiai menyampaikan betapa pentingnya berpolitik. Dipersiapkan pula dengan adanya buku-buku yang memadai mengenai pemikiran politik, agar difungsikannya nalar serta kognitifnya bertambah seiring menyerapnya

---

<sup>18</sup> Brownhill dan Smart, *Political Education*.

<sup>19</sup> Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*.

berbagai informasi. Mengintensifkan pelatihan kepemimpinan di Pondok Pesantren merupakan cara tepat yang ditempuh oleh Pondok Pesantren Abu Manshur. Pelatihan ini didasarkan pada teori-teori kepemimpinan. Perdebatan apakah pemimpin itu bawaan (*given*), atau diciptakan (*made*) hingga kini masih mengemuka atau pemaknaan lain, manusia ada yang terlahir memang jadi pemimpin, ada pula yang memang dibentuk menjadi pemimpin. Namun demikian, Marianti menjelaskan bahwa klasifikasi teori kepemimpinan pada umumnya mengerucut pada tiga mainstream kelompok besar, yaitu kelompok teori sifat (*trait*), perilaku (*behavioral*), dan kontigensi (*contingency*)<sup>20</sup>. Adanya pelbagai pelatihan kepemimpinan di pondok pesantren dapat membantu memahami bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, walau hanya sebatas teori.

Pendidikan politik secara aspek kognitif memang tidak dijabarkan secara mendetail di dalam kurikulum pesantren, namun praktik berpolitik yang dilakukan Pondok Pesantren Abu Manshur yakni mengenai pencangkokan kepemimpinan menjadi upaya yang tidak bisa disepelekan hasilnya. Program pencangkokan dilakukan lainnya program praktik lapangan (PPL), atau kelas magang di dunia persekolahan. Para kiai mendelagasikan tugasnya kepada guru dan santri untuk saling belajar di pondok pesantren lainnya. Studi banding diperlukan guna mencontoh hal-hal baik yang dapat ditiru dan diterapkan dalam proses pembentukan karakter pemimpin.

Penyampaian materi mengenai *leadership* menjadi tonggak utama santri termotivasi tekun mendalami Pendidikan politik. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan figur alumni pondok pesantren yang berkualitas. Terbukti banyak lulusannya yang melanjutkan studi di Mesir dan aktif di kampusnya masing-masing. Alumni nantinya dapat ditarik menjadi pendakwah atau dapat mengabdikan dirinya pada masyarakat, dengan demikian proses panjang pendidikan tidak hanya menghantarkan santrinya lulus, namun menyiapkan santri untuk hidup dalam bermasyarakat.

Pendampingan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Abu Manshur ini merupakan langkah lain dalam upaya pemberian pendidikan politik. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Abu Manshur dapat mendorong percepatan lahirnya kepemimpinan yang ideal yaitu pemimpin yang dalam dirinya terpenuhi kecakapan untuk memimpin. Kecakapan ini bersifat naluriah (*given*) atau bersifat *malakah irādiyyah* (*by effort*). Dengan demikian budaya politik yang tercipta pada Pondok Pesantren Abu Manshur nyata adanya. Politik tidak lagi dianggap menjadi barang tabu. Para santri tidak

---

<sup>20</sup> Maria Merry Marianti, 'Teori Kepemimpinan Sifat', *Bina Ekonomi*, 2009.

terkungkung pada pemahaman terkait keilmuan keagamaan saja. Santri dibina agar memiliki karakter dan attitude yang baik dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang menjadi pilarnya dalam pengambilan keputusan.

## **B. Pendidikan Politik Pasca Pesantren**

Pendidikan politik tetap diberikan meski telah lulus dari pondok pesantren. Melalui pendidikan politik pasca pesantren diharapkan dapat melahirkan kaderisasi politikus yang menjunjung tinggi karakter Islami, cakap, matang, memiliki attitude yang baik dalam berpolitik, serta memegang teguh nilai-nilai keislaman. Lebih dari itu, lembaga ini nantinya dapat mempersiapkan regenerasi politisi Muslim kontemporer yang berkarakter Islami. Jika, dalam sejarah pertumbuhan nasionalisme Indonesia dikenal generasi 1908, 1928, 1945, 1966, 1998, dan 2000-an, maka melalui pesantren politik (pendidikan politik pasca pesantren) ini akan membuat generasi baru.

Para santri yang telah lulus diberikan pembekalan pendidikan politik tersebut agar dapat menguatkan kembali dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai keislaman yang telah didalami sebelumnya selama di pesantren. Keterlibatan mereka dalam perpolitikan ialah langkah untuk melahirkan pembaru dan pelopor kebangsaan yang bersifat religius, sebagaimana nilai-nilai keislaman yang telah diinternalisasi ke dalam kepribadiannya mengandung kulminasi dan sinergi dari moralitas teologis, humanis, dan ekologis dari sisi teoretik<sup>21</sup> dan sebagai terapan dari ajaran *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai landasan praksis bagi transformasi sosial<sup>22</sup>.

Peran santri untuk menghidupkan politik yang bernafaskan keislaman begitu penting untuk membawa politik kembali kepada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam ajaran Islam. Sebab berbagai krisis sosial dan ekologis yang khususnya semakin tidak terkendali di era kapitalisme ini<sup>23</sup> turut disebabkan oleh pemberontakan manusia modern atas transendensi Tuhan beserta nilai-nilai ajarannya yang terkandung di dalam agama<sup>24</sup>.

Bukan tidak mungkin jika retasan alumni pesantren politik tersebut dapat diterima, kredibel dan berkualitas tentunya dapat mengubah peta perpolitikan nasional di masa depan yang carut marut ini. Kondisi ini, layaknya

---

<sup>21</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 2007).

<sup>22</sup> Akmal Hawi, 'Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005', *Jurnal Medina-Te* 15, no. 1 (2019).

<sup>23</sup> Fritjof Capra, *The Hidden Connection: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru* (Yogyakarta: Jalasutra, 2005); John Bellamy Foster, *Ekologi Marx: Materialisme dan Alam* (Jakarta: WALHI, 2013).

<sup>24</sup> Herawati, 'Manusia Modern dan Kerusakan Lingkungan' (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

dinamika kehidupan Islam pada dekade 90an pasca lahirnya ICMI yang menandai kristalisasi pergeseran suatu pola kepemimpinan ulama ke arah pola intelektualisme dalam proses regenerasi Muslim. Bedanya, jika ICMI terkonstruksi elitis, maka alumni pesantren politik terkondisikan menjadi pribadi yang agamis (ulama), intelek, sekaligus populis. Poin terpenting harus diperhatikan adalah kehadiran pesantren politik di Indonesia menjadi momentum adanya reformulasi kepemimpinan Islam secara alami, dan genuine (hakiki).

Praktis, politik, dan persoalan kenegaraan menjadi persoalan bersama yang harus dituntaskan. Area politik menjadi area yang populis, tidak tabu, apalagi elitis. Muaranya, masyarakat awam yang ditandai kaum santri mendapatkan pendidikan politik yang nyata. Lebih dari itu, dikarenakan stok calon politisi yang berasal dari alumni pesantren melimpah, maka partai politik lebih leluasa dapat merekrut kader, pengurus kepartaian, dan calon legislatif bermutu. Paling tidak, melalui pesantren politik akan mempersiapkan dan mematangkan modal agama, modal intelektual, modal kultural, dan modal sosial santri. Sementara modal kapital untuk menjadi politisi yang sesungguhnya berada pada individu, dan partai politik masing-masing. Ijtihad leadership Islam inilah meminjam bahasa M. Nashir disebut sebagai sebuah perjuangan Islam melalui jalur politik<sup>25</sup>.

## KESIMPULAN

Banyak bentuk yang dilakukan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan politik yang ditempuh oleh Pondok Pesantren Abu Manshur. Upaya tersebut antara lain dengan menyisipkan nilai-nilai politik pada saat ceramah, ada pula ruang kaderisasi membentuk setiap individu dengan pencangkakan dan intensif pelatihan kepemimpinan dengan menghadirkan figur-figur yang laik dalam bidang politik, agar dapat memotivasi para santri. Hal ini pula ditujukan untuk mempersiapkan santri yang mampu menjadi aktor dalam pembentukan kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya bangsa.

Pondok Pesantren idealnya dapat menampilkan budaya politik praktis seperti yang dilakukan oleh para politisi ketika hendak mengikuti kontestasi politik di Indonesia. Dengan demikian, teladan yang diberikan para kyai dapat diambil pesannya, baik secara tersirat maupun tersurat agar tidak terjadi polarisasi yang berkepanjangan serta agar para santri tahu betul langkah awal ketika akan mengikuti kontestasi politik itu seperti apa.

---

<sup>25</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan dalam Islam* (Yogyakarta: Sipiress, 1999).

Dengan demikian, pendidikan politik di pondok pesantren sejatinya merupakan ijtihad ilmiah untuk memantik, sekaligus pengungkit (leverage) terwujudnya calon pemimpin ideal versi Islam di Indonesia. Hanya saja, orientasi, dan tujuan perpolitikan ala santri bukan hanya sekadar menjadikan kekuasaan sebagai tumpuan akhir, melainkan sebagai bagian dari instrument dakwah dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang kini terkikis zaman.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Azra, Azyumardi. 'Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia'. *Jurnal Indo-Islamika* 1, no. 2 (2012).
- Barton, Greg, dan Greg Fealy. *Tradisionaisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Batawi, Johasan Watson. 'Tingkat Kesadaran Politik Pemula Dalam Pilkada'. *Jurnal UNIERA* 2, no. 2 (2013).
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama SEbagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1991.
- Brownhill, Robert, dan Patricia Smart. *Political Education*. New York: Routledge, 1989.
- Burdah, Ibnu. *Islam Kontemporer, Revolusi, dan Demokrasi: Sejarah Revolusi Politik Dunia Islam dan Gerakan Arab dalam Arus Demokrasi Global*. Malang: Intrans Publishing, 2014.
- Capra, Fritjof. *The Hidden Connection: Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra, 2005.
- Efrinaldi. 'Paradigma Politik Islam: Prototipe Negara Madinah dan Prinsip-Prinsip Politik Kenegaraan'. *Jurnal Al Ijarah* 2, no. 2 (2017).
- Foster, John Bellamy. *Ekologi Marx: Materialisme dan Alam*. Jakarta: WALHI, 2013.
- Hawi, Akmal. 'Prinsip-Prinsip Islam Tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005'. *Jurnal Medina-Te* 15, no. 1 (2019).
- Herawati. 'Manusia Modern dan Kerusakan Lingkungan'. UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda (1982).
- Jackson, Karl D. *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Pustaka Uama Grafiti, 1990.
- Kartono, Kartono. *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Kumar, Deepa. *Islam Politik: Sebuah Analisis Marxis*. Yogyakarta: Indo Progress, 2016.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Bandung: Penerbit Mizan, 2017.
- Marianti, Maria Merry. 'Teori Kepemimpinan Sifat'. *Bina Ekonomi*, 2009.
- Mulkhan, Abdul Munir. *Runtuhnya Mitos Politik Santri Strategi Kebudayaan dalam*

*Islam*. Yogyakarta: Sypress, 1999.

Rahman, Fazlur. 'The Qur'anic Concept of God, the Universe and Man'. *Islamic Studies* 6, no. 1 (1965).

Shadr, Muhammad Baqir. *Risalatuna Pesan Kebangkitan Umat: Konsep Dakwah, Pemikiran, dan Reformasi Sosial*. Yogyakarta: Rauzyan Fikr, 2011.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.

Syam, Syafruddin. 'Pemikiran Politik Islam Imam al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia'. *Jurnal Al-Hadi* 2, no. 2 (2017).

UU No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (2019).

UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).